

**EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka

Nomor : 19/Pdt.Bth/2020/PN.Mjl.)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Akhwal Syakhshiyah)



Oleh :

SUBITO

Nim : 19086040022

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2021

ABSTRAK

S U B I T O, Nomor Induk Mahasiswa (Nim) : 19086040022, EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 19/Pdt.Bth/2020/PN.MjL).

*Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 berlaku terhadap Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 Berdasarkan asas-asas hukum, yakni asas *lex posteriori derogat legi priori* "Aturan hukum yang baru menysihkan aturan hukum yang lama", dan asas *lex specialis derogat legi generali*: "aturan hukum yang khusus menysihkan aturan hukum yang umum", maka semua aturan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku juga bagi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.*

Keberadaan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II itu adalah Pengadilan Negeri yang merupakan termasuk dalam kategori Pengadilan umum, Peradilan umum sendiri dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung atau MA. Pengadilan negeri itu ada di ibu kota kabupaten atau kota, sedangkan pengadilan tinggi ada di ibukota provinsi, sedangkan Mahkamah Agung berada di ibu kota negara, Jakarta.

*Pengadilan Negeri Majalengka yang termasuk kategori peradilan umum itu memiliki fungsi pokok dalam menyelenggarakan Peradilan di wilayah hukumnya, Pengadilan Negeri atau PN merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota, dalam hal ini adalah Pengadilan negeri majalengka, Dalam pembentukannya, Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Maka mengingat asas *lex posteriori derogat legi priori* "Aturan hukum yang baru menysihkan aturan hukum yang lama", dan asas *lex specialis derogat legi generali*: "aturan hukum yang khusus menysihkan aturan hukum yang umum", yang dimaksud adalah tentang penanganan perkara Syariah apapun permasalahannya, Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah.*

Kata Kunci :

Sengketa Perbankan Syariah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama

ABSTRACT

SUBITO Student Identification Number (Nim): 19086040022, EXISTENCE IN MAJALENGKA STATE COURT SETTLEMENT DISPUTES SHARIA BANKING (Juridical Analysis of Majalengka District Court Decision Number: 19/Pdt.Bth/2020/PN. Mjl).

*Law Number 30 of 1999 This applies to the Law on Religious Courts Number 3 of 2006 Based on legal principles, namely the *lex posteriori derogat legi priori* principle "The new legal rules set aside the old legal rules", and the *lex specialis derogat legi generali* principle: general rule of law", then all the rules in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution also apply to the Religious Courts / Syar'iyah Courts.*

The existence of the Majalengka Class II District Court is a District Court which is included in the category of general courts. General courts themselves are divided into several categories, namely district courts, high courts, and the supreme court or MA. The district court is in the district or city capital, while the high court is in the provincial capital, while the Supreme Court is in the state capital, Jakarta.

*The Majalengka District Court which is included in the category of general justice has the main function of administering trials in its jurisdiction, the District Court or PN is a judicial institution within the *kehupatan* or Majalengka scope, based on the Presidential Decree, in Law Number 2 of 1986 concerning General Courts, so considering the principle of *lex posteriori derogat legi priori* "The new rule of law overrides the old rule of law". and the principle of *lex specialis derogat legi generali*: "a special rule of law that sets aside general legal rules", which is about the handling of Sharia cases, whatever the problem, the District Court does not have the authority to resolve Sharia Banking Disputes. city, in this case the District Court. In its formation, the District Court was formed.*

Keywords :

Sharia Banking Disputes, District Court, Religious Court

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI MAJALENGA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka
Nomor: 19/Pdt.Bth/2020/PN.Mjl)



Disusun oleh :

SUBITO
NIM. 19086040022

Telah disetujui pada tanggal 24 Nopember 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. D. Sugianto, S.H.,M.H.
NIP. 19670228 200501 1 002


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**
(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka
Nomor: 19/Pdt.Bth/2020/PN.Mjl)

Disusun oleh :

SUBITO
NIM. 19086040022

Telah diujikan pada tanggal 01 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

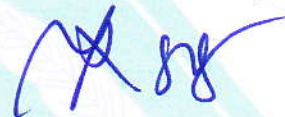
Dewan Penguji

Ketua Sidang,



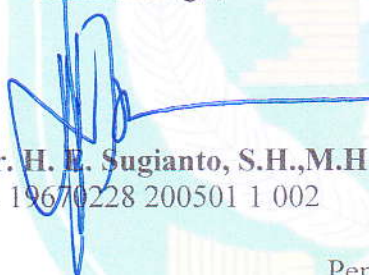
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
NIP. 19590320 198403 1 002

Sekretaris Sidang,



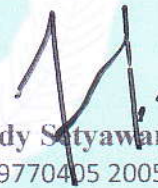
H. Didin Nurul Rosidin, MA., Ph.D
NIP. 19730404 199803 1 005

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 19670228 200501 1 002

Pembimbing II,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003

Penguji Utama,



Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag
NIP. 19590321 198303 1 002

Direktur,



Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
NIP. 19590320 198403 1 002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Subito**
NPM : **19086040022**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya.

24 JAN 2021
Cirebon, November 2021

Yang menyatakan,



SUBITO

PEDOMAN TRANSLITERASI

1) Huruf Arab dan Latin.

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak Dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Š	غ	g
ج	J	ف	F
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Z	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	y
ض	D		

2) *Maddah* atau Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ي - ا -	Â
ي -	î
و -	û
ي ا	Ai
وا -	Au

MOTTO

خَيْرُ أَوْقَاتِكَ وَقْتُ تَشْهَدُ فِيهِ وُجُودَ فَاقَتِكَ ،
وَتَرُدُّ فِيهِ إِلَى وُجُودِ ذَلَّتِكَ

*Sebaik-baik waktumu adalah ketika kau menyadari
betapa tergantungnya dirimu kepada Allah
dan betapa hinanya dirimu.*

*Your best moment is the one wherein you
witness your actual indigence and, through it,
reach the reality of your lowliness.*

- *Ibnū Atha'illah as-Sukandari* –
AL HIKAM, hlm. 162.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat kepadaku selama aku menempuh studi.
2. Almamater Program Studi Hukum Keluarga (HK) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syech Nurjati Cirebon, yang telah mendidik dan membinaiku.

Penyusun,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas *taufik* dan *inayah-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata Dua (S2) atau Magister pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) **SYEKH NURJATI CIREBON**, guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam Upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H., Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai pembimbing dan juga kepada sumua Pihak yang telah mendukung selesainya penulisan ini.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari segala keterbatasan penulis baik waktu, tenaga, biaya maupun kemampuan penguasaan keilmuan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima dengan terbuka demi perbaikan tesis ini.

Akhirnya penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga semua jasa, bantuan, bimbingan, arahan dan kontribusi nya, mendapat pahala dari Allah SWT dan mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang sengketa perbankan syariah.

Cirebon, November 2021

Penyusun,

DAFTAR ISI

Halaman :

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORIENTASI PENELITIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. SITEM PERADILAN INDONESIA	23
1. Peradilan Umum	26
1.1.Pengadilan Khusus Anak	26
1.2.Pengadilan tindak Pidana Korupsi	27
1.3.Pengadilan Perikanan	27
1.4.Pengadilan Hak Asasi Manusia	27
1.5.Pengadilan Niaga	27
1.6.Pengadilan Hubungan Internasional	28

2. Peradilan Agama	28
3. Peradilan Tata Usaha Negara	29
4. Peradilan Militer	30
5. Peradilan Konstitusi	31
B. EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	32
1. Fungsi Mengadili atau Judicial Power	33
2. Fungsi Pembinaan	34
3. Fungsi Pengawasan	34
4. Fungsi Nasehat	34
5. Fungsi Administratif	34
C. PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH	35
1. Prinsip Syariah	43
2. Asas Personalitas Keislaman	49
3. Asas Penundukan Diri	54
D. EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN	57
1. Model Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perdata	57
2. Tata cara Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak tanggungan Oleh KPKNL	58
a. Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan	58
b. Tahapan-tahapan Eksekusi hak tanggungan	58
1) Permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Agama	58
2) Pemeriksaan Surat-surat Bukti	58
3) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	59
4) Aanmaning	59
5) Penetapan Sita Eksekusi	59
6) Permohonan Lelang Ke KPKNL	59
7) Pelaksanaan Lelang Oleh KPKNL	59

E. Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor :	
19/Pdt.Bth/2020/PN.Mjl.	60
1) Dalam Eksepsi Kompetensi absolut	63
2) Putusan Sela	65
3) Dalam pokok Perkara	65
4) Dalam Pertimbangan Majelis Hakim	82
5) Putusan Majelis Hakim	87
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Temuan Umum Penelitian	88
1. Akad Pembiayaan Al Musyarakah	88
2. Gross Risalah Lelang Nomor 319/35/2020	89
3. Salinan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00005	89
4. Surat Keterangan Ahli Waris	90
B. Temuan Khusus Penelitian	90
1. Risalah Panggilan Aanmaning	90
2. Surat Pelaksanaan Konstatering	91
3. Surat Penetapan Eksekusi	91
4. Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi	94
5. Berita Acara Sita Eksekusi	94
6. Surat Gugatan Perlawanan	95
7. Putusan Pengadilan Negeri Majalengka	96
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xviii